



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 28 Januari 2009

Halaman: 3

Media Massa : Radar Hari : Rabu Tanggal : 28-01-09

**Wali Kota
Tantang Dewan**

WALI KOTA
Sambungan dari hal 3

SLEMAN - Wali Kota Herry Zudianto mengkritisi kinerja DPRD Kota dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi. Menurut wali kota, bila upaya pemberantasan korupsi akan berjalan efektif, maka komitmen parlemen harus melebihi eksekutif. "Ini karena tugas dan fungsi dewan adalah pengawas. Namanya pengawas kalau komitmennya lebih rendah menjadi lucu," sentil Kang Herry, sapaan akrabnya saat berbicara dalam Seminar Sosialisasi Indeks Persepsi Korupsi 2008 dan Indeks Suap 50 Institusi Publik di Indonesia di Jogjakarta Plaza Hotel (JPH) Mrican, Depok, Sleman, kemarin.

Kang Herry diundang tampil menjadi pembicara oleh Transparency International Indonesia (TII), Jogjakarta adalah salah satu kota yang disurvei TII. Hasilnya, dari 50 kota yang disurvei, indeks persepsi korupsi (IPK) Kota Jogja mendapatkan skor tertinggi 6,43 dan dinyatakan sebagai kota terbersih dari korupsi.

Pria yang baru saja masuk dalam 10 tokoh versi Majalah Tempo itu mengatakan, untuk mencegah korupsi, maka semua pihak harus terlibat. Tak hanya pemkot dan dewan, tapi juga masyarakat harus berpartisipasi aktif. Bila staf pemkot sudah berubah dengan tidak lagi meminta, maka sebaiknya masyarakat juga tidak membujuk dengan menjanjikan sesuatu pada anak buahnya.

▶ *Baca Wali Kota... Hal 13*

Wali Kota mengakui sudah berupaya mengadakan pencegahan sejak dini. Salah satunya dengan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian PAN sejak April 2007 pihaknya telah meneken Pakta Integritas. Kang Herry menantang mitra kerjanya yakni Dewan Kota juga melakukan hal sama dengan menandatangani Pakta Integritas. Sayangnya, ajakan untuk bersama-sama meneken Pakta Integritas itu sampai sekarang belum direspon. "Itu menjadi PR kita bersama," ujarnya.

Tak seperti diskusi antikorupsi yang biasa digelar, seminar yang digelar TII itu mengundang perhatian banyak peserta. Terbukti, peserta seminar itu sampai meluber hingga luar ruangan. Selain Kang Herry, seminar itu juga menampilkan puteri ketiga mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Anita Rahman yang menjadi staf peneliti TII, pejabat fungsional KPK Insan Fahmi, Bidang Pengembangan

dan Penyuluhan Antikorupsi Kementerian PAN Gunawan S dan Direktur Pukat Korupsi UGM Zainal Arifin Mochtar.

Sedangkan Zainal merasa miris dengan angka 6,43 yang diraih Pemkot Jogja. Bagi Pukat, prestasi itu bukan sesuatu yang mengembirakan. "Kenapa hanya dapat angka 6," tutur Uceng sapaan karibnya.

Mestinya dengan banyaknya lembaga pengawasan seperti LOD, LOS, dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIJ-Jateng plus berbagai aktivis LSM yang berkecimpung di Jogja, prestasi Jogja bisa lebih dari angka tersebut.

Di sisi lain menanggapi ajakan wali kota meneken Pakta Integritas, Ketua DPRD Kota Arif Noor Hartanto menyatakan prestasi yang diraih pemkot itu bukan semata prestasi pemkot. "Itu juga prestasi masyarakat dan dewan," ungkap Inlung, demikian ia akrab dipanggil.

Inlung mengatakan Pakta Integritas akan sulit direalisasikan pada Dewan Kota Periode 2004-2009 ini. Sebaiknya ajakan itu dilaksanakan pada Dewan Kota hasil Pemilu 2009 mendatang. (kus)

Terbaca Kepada Yth :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 27 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005